



PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sumber, Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu-isu Strategis.....	4
1.4 Keadaan Pegawai.....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	5
1.6 Keuangan	7
1.7 Sistematika LKIP.....	7
1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP tahun 2022	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	16
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.2.1 Sasaran Strategis ke-1.....	23
3.2.2 Sasaran Strategis ke-2.....	30
3.2.3 Sasaran Strategis ke-3.....	37
3.2.4 Sasaran Strategis ke-4.....	43
3.2.5 Sasaran Strategis ke-5.....	48
3.3 Realisasi Anggaran.....	56
3.4 Inovasi.....	56
3.5 Penghargaan.....	57
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	59

LAMPIRAN	61
Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	62
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	63
Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 2022	64
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2022.....	65
Lampiran 5. IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023	66
Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.....	67
Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2023.....	68
Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2023.....	69
Lampiran 9. IKU 5 - Hasil Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....	70
Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis kelamin dan Kompetensi.....	4
Tabel 1.2	Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2023.....	5
Tabel 1.3	Data Aset Dinas Komunikaasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023.....	6
Tabel 2.1	Kinerja Diskominfo Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan, Program, kegiatan, Sub Kegiatan Diskominfo Kabupaten Cirebon.....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023.....	15
Tabel 2.4	Target Belanja Diskominfo Tahun 2023.....	16
Tabel 2.5	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	16
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Sasaran.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023.....	22
Tabel 3.3	Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	23
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1	24
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya	24
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024.....	25
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Sasaran 1	26
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran 1.....	27
Tabel 3.9	Rentang Nilai Predikat.....	30
Tabel 3.10	Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	30
Tabel 3.11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2	30
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya	31
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024.....	31

Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Metropolitan Rebana di Tahun 2023	32
Tabel 3.15	Tingkat Efisiensi Sasaran 2.....	34
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 2.....	35
Tabel 3.17	Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	37
Tabel 3.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3.....	37
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya.....	38
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024.....	39
Tabel 3.21	Tingkat Efisiensi Sasaran 3.....	41
Tabel 3.22	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 3.....	41
Tabel 3.23	Formulasi Pengukuran Sasaran 4	43
Tabel 3.24	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 4.....	43
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya	44
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024.....	45
Tabel 3.27	Tingkat Efisiensi Sasaran 4.....	46
Tabel 3.28	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 4.....	47
Tabel 3.29	Formulasi Perhitungan Sasaran 5.....	48
Tabel 3.30	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 5.....	48
Tabel 3.31	Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan	48
Tabel 3.32	Nilai Survei Pelayanan.....	50
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya	50
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024	50
Tabel 3.35	Tingkat Efisiensi Sasaran 5.....	52
Tabel 3.36	Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5.....	52
Tabel 3.37	Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023	55
Tabel 3.38	Capaian Anggaran per Sasaran	56

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	2
Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Diskominfo Kabupaten Cirebon.....	2
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Cirebon.....	3
Gambar 2.1 Cascading Kinerja Bupati yang diampu Diskominfo Kabupaten Cirebon	12
Gambar 2.2 Aplikasi E-SAKIP.....	19
Gambar 2.3 Aplikasi e-kinerja.....	20
Gambar 2.4 Aplikasi Simonek.....	20
Gambar 3.1. Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan KAMI.....	44
Gambar 4.1 Hasil Kegiatan Berupa laporan SKM Tahun 2023.....	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024. Visi tersebut yakni *“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”*, dengan misi yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu misi ke-4 *“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.”* Maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel.”* Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;
- 3) Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.
- 2) Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2023 berdasarkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi ditunjukkan pada 4 (empat) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 181,84%, Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan capaian kinerja 100,03%, Indeks Keamanan Informasi dengan capaian kinerja 100%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 100,06%, sementara capaian kinerja dengan kategori tinggi ditunjukkan pada 1 (satu) indikator yaitu Indeks Domain Tata Kelola SPBE (83,62%).
- 3) Anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 Rp. 17.435.703.988,00 dengan realisasi Rp. 16.734.549.000,00 atau sebesar 95,98%.

Evaluasi atas sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ke depan, sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ada.
- 2) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 3) Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus. Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang ditentukan.
- 4) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen inovasi proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE.
- 5) Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan atas layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
- 6) Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan reviu fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.
- 7) Penyeragaman strategi media, mengidentifikasi tren kelemahan dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media, peningkatan konten, pemanfaatan teknologi, optimasi platform online, peningkatan kemitraan media dan melibatkan partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi publik dapat meningkat.
- 8) Mendorong peningkatan single data dan big data centre yang terintegrasi, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait.
- 9) Melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan tata kelola data statistik sektoral
- 10) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.



BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Fungsi dan Tugas
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Keadaan Sumber Daya
(Pegawai, Sarana dan
Prasarana, dan
Keuangan)
- 1.5 Sistematika LKIP
- 1.6 Laporan Hasil Tindak
Lanjut Evaluasi LKIP
Tahun 2022

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 000.8.6.3/19/SETDA tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

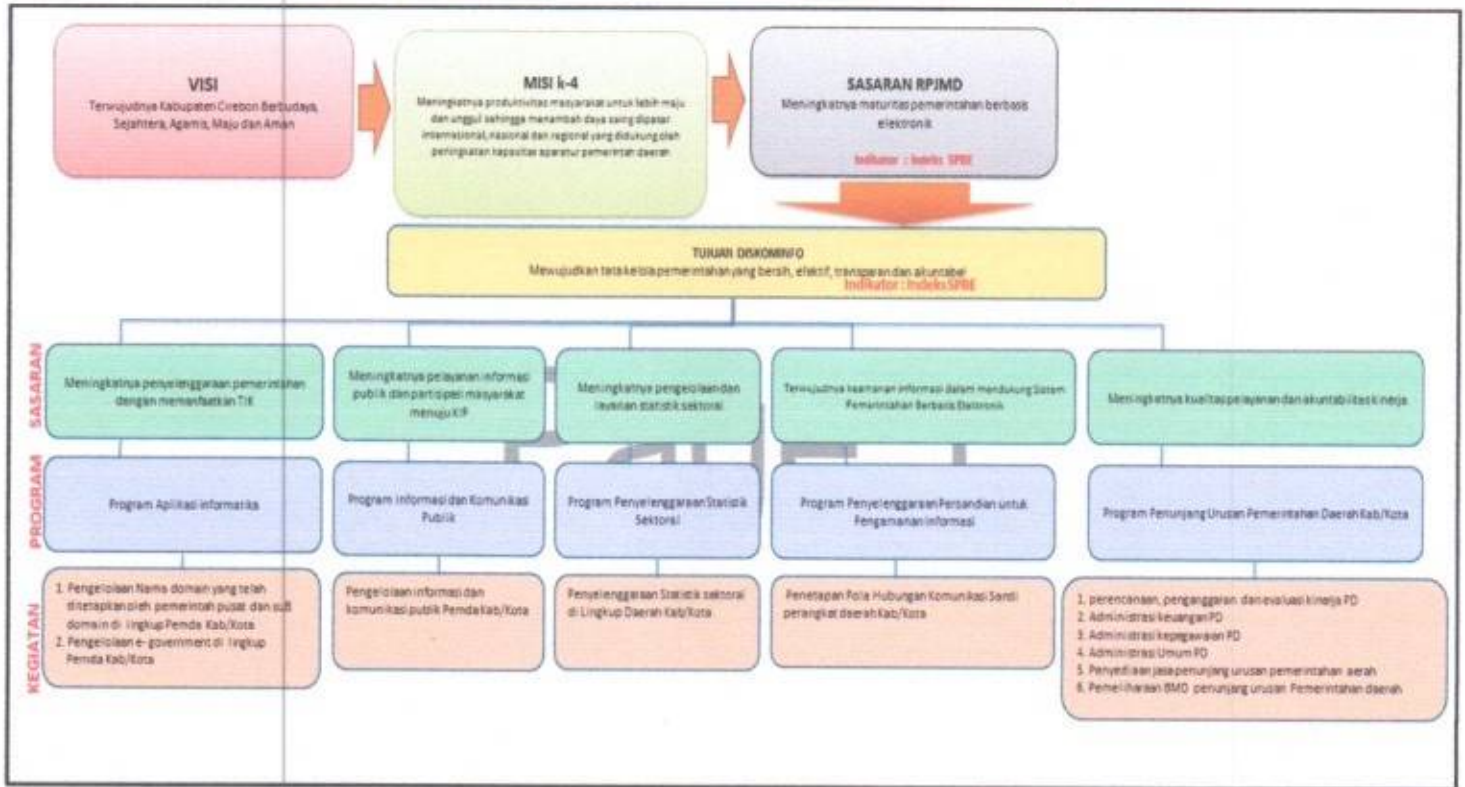
1.1 Struktur Organisasi

1.1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

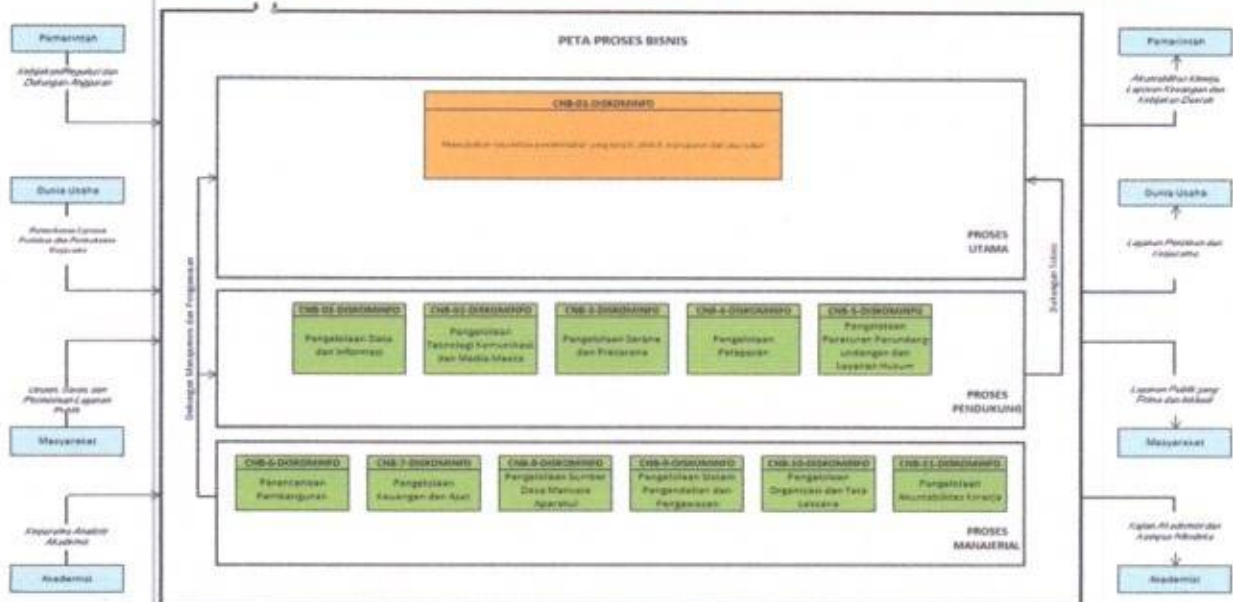


Sumber : Dokumen Cascading Diskominfo Tahun 2023

1.1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Diskominfo Kabupaten Cirebon

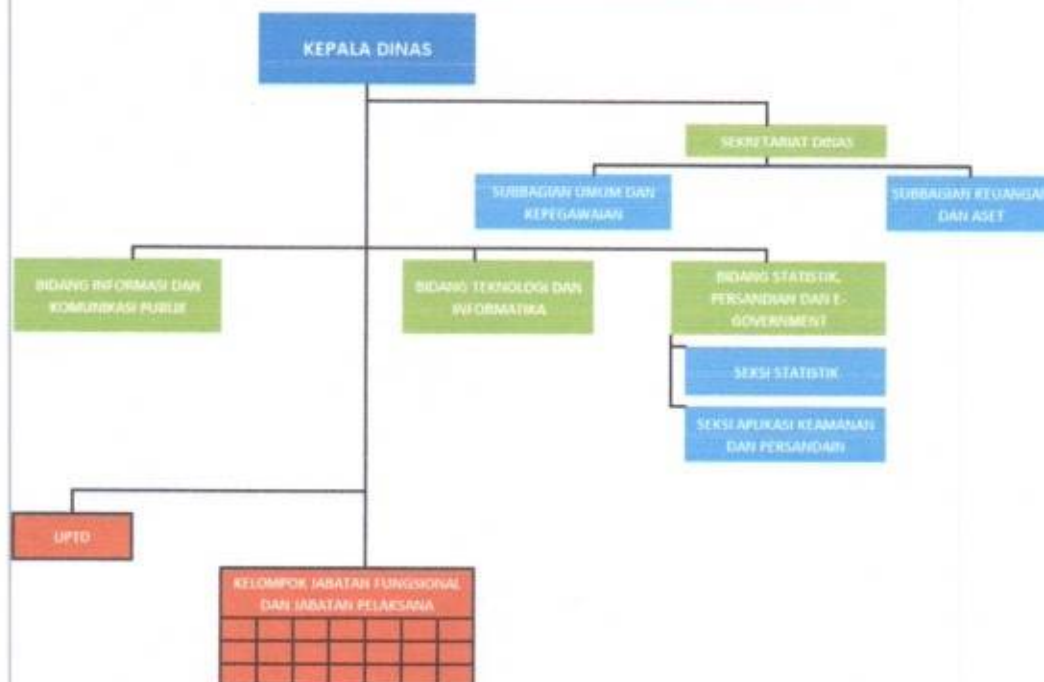


Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 sebagai berikut :

Struktur Organisasi

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Teknologi dan Informatika
5. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri dari:
 - a. Seksi Statistik
 - b. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Cirebon



1.2 Tugas dan Fungsi

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tugas Pokok

"Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah."



Fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- pengelolaan aplikasi informatika;
- pengelolaan statistik sektoral;
- penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data.
- Pengembangan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk kontribusi pembangunan
- Mewujudkan Satu Data Kabupaten Cirebon
- Penyelenggaraan keamanan informasi di daerah

1.4 Keadaan Pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 24 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Pegawai yang Ada				Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
			S2	S1	D3	SLTA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi							
	Kepala Dinas	1	1			1		
B.	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	4	1	3		2	2	
	2. Pengawas	4	1	3		2	2	
	3. Pelaksana	10		5	3	2	2	
C.	Jabatan Fungsional	5	2	3		4	1	
	Jumlah	24	5	14	3	2	7	

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Desember 2023



Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang (58.33%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang (20.83%), D3 3 orang (12.5%), SLTA 2 orang (8.33%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural hampir sama banyak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Disamping data ASN diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terdapat pegawai Non ASN sebanyak 33 pegawai. Perbandingan jumlah pegawai ASN dan Non ASN di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan data terakhir Bulan Desember 2023 diinformasikan pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2023

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
1.	ASN	24	42.11
2.	Non ASN	33	57.89

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Desember 2023

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang ada saat ini berupa kantor ada 4 unit:

- Gedung Utama di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber yang ditempati Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Desk Informasi Publik, aula Diskominfo, Mushola
- Gedung Kedua di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber, yang ditempati untuk Komisi Informasi Kabupaten Cirebon
- Gedung Data Center di jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber yang terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 yang ditempati Bidang Teknologi Informatika, Ruang Rapat sedangkan lantai 2 merupakan ruang server dan Ruang Learning Center
- Command Center Kabupaten Cirebon di Jl. Sunan Kalijaga No.7 Sumber yang berada di Kantor Bupati Cirebon.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki sarana penunjang berupa kendaraan dinas/operasional sejumlah:

- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit
- Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 5 unit



Sedangkan aset lain berupa sarana parasarana penunjang kegiatan kantor, yang ada di sekretariat dan bidang-bidang rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Nama Bidang Barang	Volume/ Satuan	Keterangan
1	GOLONGAN TANAH		
	Tanah	3 Bidang	
2	GOLONGAN PERALATANDAN MESIN		
	Alat-alat Besar		
	- Transportable Generating Set	2 Unit	
	Alat-alat Angkutan		
	-Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	5Unit	
	-Kendaraan Bermotor Roda 2(dua)	11Unit	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari besi	25 Buah	
	- Lemari kayu	7 Buah	
	- Rak besi	16 Buah	
	- Rak kayu	1 Buah	
	- Filling Cabinet besi	8 Buah	
	- Brandkas	1 Buah	
	- Lemari sorok	3 Buah	
	- Lemari kaca	2 Buah	
	- CCTV	28 Unit	
	- Elektronik white board	1 Buah	
	- Alat penghancur kertas	1 Buah	
	- Mesin absensi	1 Buah	
	- Alat pengaman/sinyal	7 Buah	
	- LCD projector/infocus	2 Buah	
	- Meja rapat	6 Buah	
	- Meja resepsionis	3 Buah	
	- Meja ½ biro	30 Buah	
	- Kursi rapat	99 Buah	
	- Kursi tamu	5 Buah	
	- Kursi putar	65 Buah	
	- Meja computer	25 Buah	
	- Sofa	5 Buah	
	- Mesin penghisap debu	1 Buah	
	- Lemari es	1 Buah	
	- AC Splyty	41 Buah	
	- Exhaust Fan	4 Buah	
	- Kompor gas	1 Buah	
	- Tabung gas	2 Buah	
	- Radio	1 Buah	
	- Televisi	26 Buah	
	- Sound system	2 Buah	
	- Microphone	2 Buah	
	- Unit power supply	5 Buah	
	- Tangga alumunium	2 Buah	
	- Dispenser	2 Buah	
	- Podium	1 Buah	
	- Handycam	1 Buah	
	- Audio mixing portable	2 Buah	
	- Audio visual	1 Buah	
	- Digital LED Running Text	37 Buah	
	- Video monitor	1 Buah	
	- Video mixer	1 Buah	
	- Camera film	2 Buah	
	- Lensa kamera	4 Buah	
	- GPS receiver	3 Unit	
	- PC	1 Unit	
	- Laptop	70 Unit	
	- Notebook	9 Unit	
	- Scanner	7 Unit	
	- Printer	21 Unit	
	- Server	28 Unit	
	- Router	10 Unit	
	- Rak server	4 Unit	



No.	Nama Bidang Barang	Volume/ Satuan	Keterangan
3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
	- Bangunan gedung kantor	5 Unit	
	- Bangunan parker terbuka semi permanen	1 Unit	
	- Taman	1 Buah	
	- Bangunan menara radio	1 Unit	
	- Bangunan menara antenna microwave/parabolic	16 Unit	
4	GOLONGAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
	- Instalasi komunikasi elektronik	41 Unit	
	- Jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA	2 Unit	
	- Jaringan telepon diatas tanah kapasitas kecil	1 Unit	
5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA		
	- Video	2 Buah	
6	GOLONGAN ASET LAINNYA		
	- Software	28 Unit	
	- Kajian	21 Buah	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo, Desember 2023

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada anggaran murni 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.809.090.311,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 12.730.001.701,00 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp 4.487.660.700,00 dan belanja barang dan jasa Rp 8.242.341.001,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 79.088.610,00.

Pada perubahan anggaran 2023 anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Rp 17.435.703.988,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 15.310.860.518,00 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp 4.694.356.100,00 dan belanja barang dan jasa Rp 10.616.504.418,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 2.031.343.470,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

1.7 Sistematika LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 000.8.6.3/19/SETDA tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang : Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistematika LKIP dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN

1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
A.	PERENCANAAN KINERJA	
1.	Rencana aksi dan pengukurannya belum dipantau dilakukan secara berkala paling setiap triwulan dengan membuat laporan hasil pengukuran capaian kinerja secara berkala.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK - Laporan Triwulanan Kinerja dan keuangan
2.	Target dalam PK tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya namun belum dilengkapi dengan bukti laporan hasil evaluasi.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK
3.	Dokumen perencanaan kinerja (renstra) belum direviu secara berkala.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK
4.	Rapat rutin telah dilaksanakan dengan membahas terkait pencapaian kinerja termasuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya, namun belum dilengkapi dengan dokumen notulen rapat.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK
B.	PENGUKURAN KINERJA	
5.	Adanya keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja dalam rapat pengukuran kinerja, namun belum dilengkapi dengan notulen rapat.	- Rapat evaluasi kinerja dan keuangan tahun anggaran 2022
6.	Unit kerja belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tepat waktu sesuai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan pengukuran kinerja.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK - Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan
7.	Pengumpul data kinerja dari masing-masing penanggungjawab belum dilakukan secara berjenjang.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK
8.	Pimpinan unit kerja belum memberikan Reward atau Punishment kepada Pegawai dilingkungannya berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Capaian Kinerja).	- Pemberian reward and punishment kepada pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022
9.	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	- Melakukan reviu kinerja pegawai
10.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	- Melakukan reviu kinerja pegawai
11.	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, namun belum dilengkapi dengan dokumen hasil keputusan rapat.	- Rapat evaluasi kinerja dan keuangan tahun anggaran 2022
12.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja, namun belum didukung dengan dokumen hasil keputusan rapat.	- Rapat evaluasi kinerja dan keuangan tahun anggaran 2022



NO	URAIAN HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT
C. PELAPORAN KINERJA		
13.	Laporan kinerja belum dilakukan reviu internal.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
14.	Evaluasi AKIP internal yang dilaksanakan belum seluruhnya mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 88/2021.	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022
15.	Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh SDM yang belum mengikuti pelatihan/ diklat SAKIP.	<ul style="list-style-type: none">- Surat Tugas dan laporan hasil Bimtek penyusunan LKIP
16.	Belum dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal yang dilaksanakan oleh unit kerja.	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022
17.	Belum dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal pada unit kerja/ perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022
18.	Dalam melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi/aplikasi	<ul style="list-style-type: none">- Aplikasi Simonek dan ekinerja



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II berisi :

- 2.1 *Perencanaan Strategis*
- 2.2 *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
- 2.3 *Rencana Anggaran Tahun 2023*
- 2.4 *Instrumen Pendukung*

Memasuki Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - 2024. Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - 2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019). RPJMD

Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang ada pada dokumen Renstra 2019-2024 mengacu pada Visi dan Misi Bupati Cirebon Tahun 2019-2024, yaitu :

Gambar 2.1 Cascading Kinerja Bupati yang diampu Diskominfo Kabupaten Cirebon



Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024

Salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai Visi Bupati Cirebon dan Misi keempat yaitu **“terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa”** dengan sasaran **“meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik”** sehingga pemerintahan Kabupaten Cirebon yang diharapkan kedepan adalah pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan layanan yang terintegrasi.

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menyusun tujuan dan sasaran sesuai dengan implementasi misi keempat yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan *smart* serta penguatan otonomi desa.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan :

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu:

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel"

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2.57	2.57	2.67	2.77	2.87	2.97
2.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	55.25	56.63	40	45	50	57
3.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral	Persen	36.5	40	52.50	65	77.5	90
4.	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Poin	II	II	II	II	II	II
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	3.55	3.57	3.59	3.61	3.63

2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.



Tabel 2.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo Kabupaten Cirebon

Visi		Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman					
Misi IV		Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	Penguatan infrastruktur TIK, layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan sumber daya manusia berbasis TIK	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<p>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Layanan Hubungan Media Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah



Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.						
No	Visi Misi IV Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	
					Kegiatan	Sub Kegiatan
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	Penguatan SDM, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi Meningkatkan operasional administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan. Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2.87	5.986.451.518
	Aplikasi informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	Persen	91	5.986.451.518
2.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	50	4.259.555.300
	Informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persen	75	4.259.555.300
3.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persen	77,5	606.160.100
	Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	606.160.100
4.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Poin	Level 2	222.754.500
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	57	222.754.500
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,610	6.360.782.570
	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	787.405.900
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	95	647.066.870
		Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Persen	100	41.025.600
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	4.799.610.800
Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		Persen	100	85.673.400	



2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 12.809.090.311,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp.17.435.703.988,00, dengan rincian belanja operasi Rp. 15.310.860.518,00 dan belanja modal Rp. 2.124.843.470,00.

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.4 Target Belanja Diskominfo Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)
5.	BELANJA DAERAH	17.435.703.988
5.1.	BELANJA OPERASI	15.310.860.518
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	4.694.356.100
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.616.504.418
5.2.	BELANJA MODAL	2.124.843.470
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.031.343.470
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	93.500.000
	JUMLAH BELANJA	17.435.703.988

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon, 2023

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.5 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95 PERSEN	6.360.782.570
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95 PERSEN	
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	12 Dokumen	85.673.400
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	37.526.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	48.147.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	14 Dokumen	4.799.610.800
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	4.711.715.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	13.000.000



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	74.895.800
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis pakaian dinas/pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan	1 jenis	41.025.600
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	41.025.600
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	9 Layanan	416.407.400
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	6.001.000
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	208.988.100
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 paket	5.184.500
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	14.266.300
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	16 dokumen	26.958.000
4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/maerial yang disediakan	12 paket	43.120.600
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	3.000.000
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	108.888.900
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusanyang disediakan	2 jenis	31.820.370
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	31.820.370
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan	6 Jenis	730.998.500
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	370.998.500
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	360.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	8 Jenis	255.246.500
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	118.527.000
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	1 unit	6.930.500
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	21.330.000
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	108.459.000
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 Persen	4.259.555.300
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan	5 Media	4.259.555.300
1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi public	5 dokumen	113.350.000
1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	299.527.800
1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 dokumen	514.144.900
1.4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen	779.142.300
1.5	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	18 layanan	1.783.378.000



No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
1.6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	30 orang	99.994.000
1.7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	6 dokumen	462.327.700
1.8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	12 dokumen	207.690.600
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	91 Persen	5.986.451.518
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73 perangkat daerah	2.874.303.973
1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 unit	2.874.303.973
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan	3.112.147.545
2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	270.104.500
2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	2 unit	1.760.126.845
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	71 perangkat daerah	75.104.900
2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	5 unit	607.086.500
2.5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	9 layanan	309.724.800
2.6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai masterplan Smart City	1 dokumen	90.000.000
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80 Persen	606.160.100
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	31 perangkat daerah	606.160.100
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	2 dokumen	40.000.000
1.4	Penyelenggaraan Otomatisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 dokumen	566.160.100
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	57 Persen	222.754.500
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	23 Titik	222.754.500
2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	71 perangkat daerah	222.754.500
			JUMLAH	17.435.703.988

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2023



2.3.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Berikut alokasi anggaran per sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Sasaran

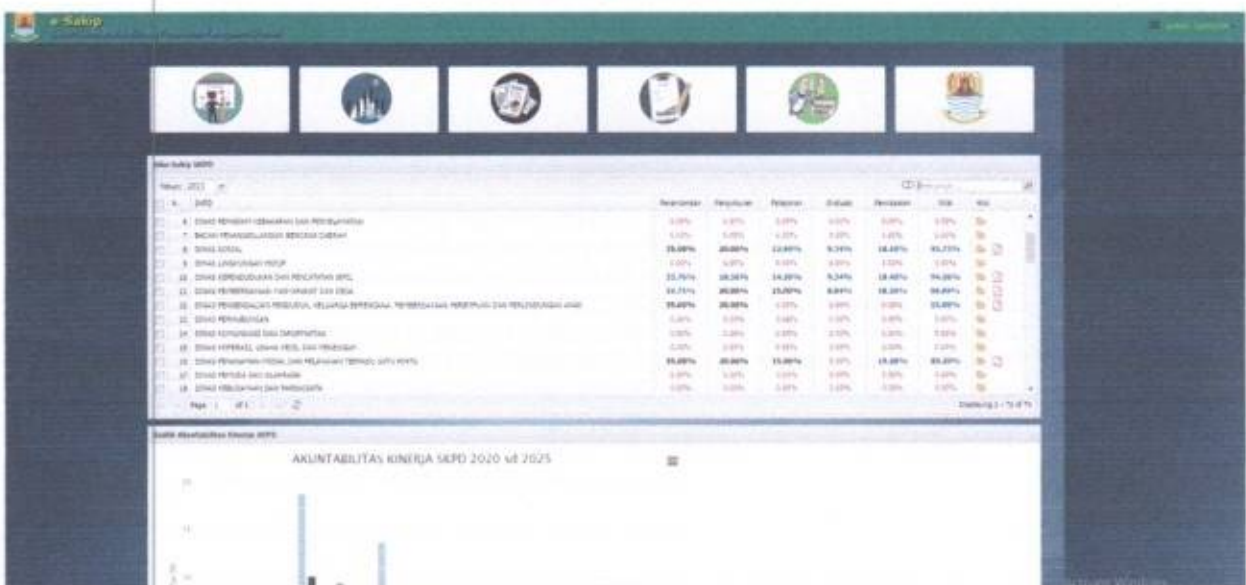
No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	5.986.451.518	34,33	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	4.259.555.300	24,43	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	606.160.100	3,48	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	222.754.500	1,28	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	6.360.782.570	36,48	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Sumber : Aplikasi Simonek Diskominfo Tahun 2023

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi sakip.cirebonkab.go.id dalam rangka memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

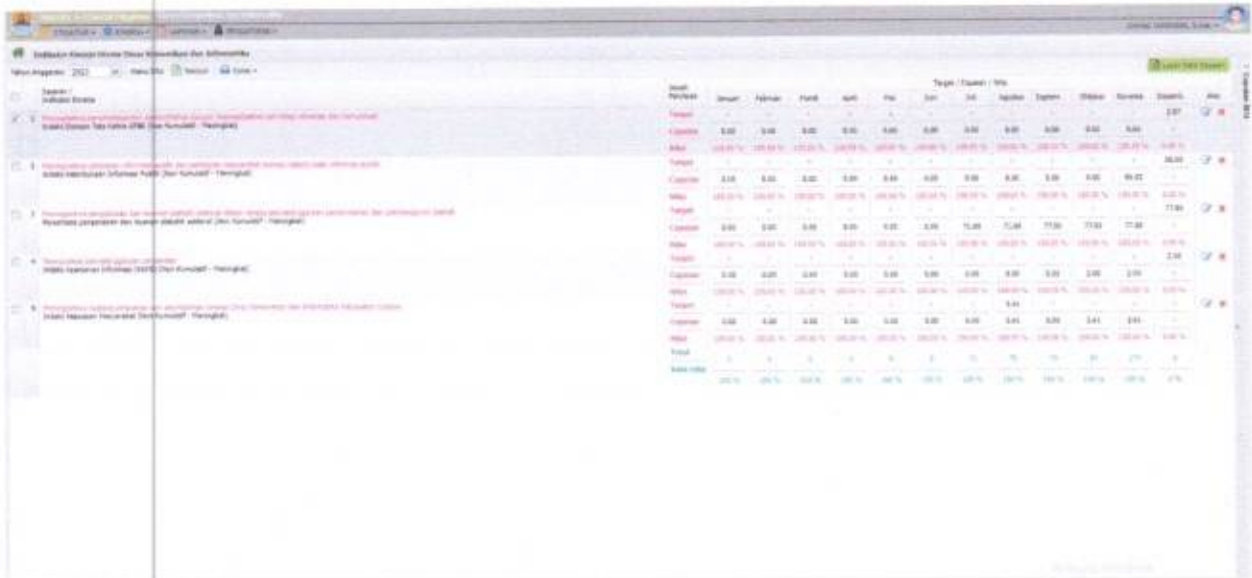
Gambar 2.2 Aplikasi E-SAKIP





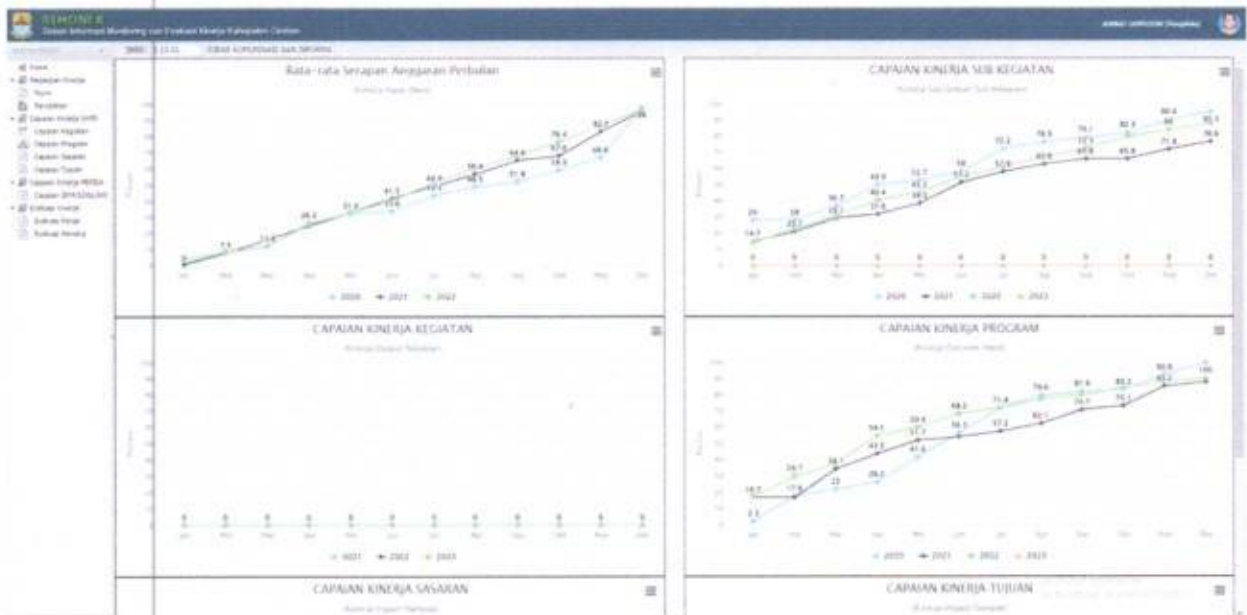
2. Aplikasi E-Kinerja merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan aparaturnya dalam menginput kegiatan/pekerjaan dan membuat Lakpran Harian Kerja. Disamping itu aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrument pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja.

Gambar 2.3 Aplikasi e-kinerja



3. Aplikasi Simonek merupakan aplikasi Pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah telah dilakukan secara terpusat dan berkala setiap bulannya mempergunakan aplikasi/sistem informasi berbasis web yaitu melalui *simonek.cirebonkab.go.id*

Gambar 2.4 Aplikasi Simonek





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III berisi :

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Inovasi
- 3.5 Penghargaan

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 < 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 < 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 < 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 < 65	Rendah	Kuning Muda
5	< 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017, Hal. 495

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan pengukuran kinerjanya dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%Capaian	Kriteria/ Kode
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	<u>Indikator:</u> Indeks Domain Tata Kelola SPBE <u>Meta Indikator:</u> Nilai domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan Kemenpan RB	2,87 poin	2,40 poin	83,62	Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	<u>Indikator:</u> Indeks Keterbukaan Informasi Publik <u>Meta Indikator:</u> Nilai keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	50 poin	90,92 poin	181,84	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	<u>Indikator:</u> Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral <u>Meta Indikator:</u> Hasil pengolahan data mandiri yang terdiri dari capaian dokumen yang telah disusun dan capaian keterisian data statistik sektoral	77,5%	77,52%	100,03	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	<u>Indikator:</u> Indeks Keamanan Informasi <u>Meta Indikator:</u> Nilai hasil penilaian mandiri terkait tingkat kesiapan keamanan informasi	Level 2	Level 2	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	<u>Indikator:</u> Indeks Kepuasan Masyarakat <u>Meta Indikator:</u> Hasil survei kepuasan aparatur terkait layanan	3,610 poin	3,612 poin	100,06	Sangat Tinggi

Sumber : Simonek Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Pengelolaan dan Layanan Data Statistik Sektoral, Indeks Keamanan Informasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2023 ini, 4 (empat) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ($\geq 100\%$), sedangkan 1 (satu) indikator lainnya belum memenuhi target. Indikator yang telah memenuhi target adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian sebesar 181,84%, Persentase Pengelolaan dan Layanan Data Statistik Sektoral dengan capaian sebesar 100,03%. Indeks Keamanan Informasi dengan capaian sebesar 100% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 100,06%. Sementara itu indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Domain Tata Kelola SPBE dengan capaian sebesar 83,62%. Analisis untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis ke-1

Sasaran 1

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pedoman pada evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tolok ukur sasaran “**meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi**”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Domain Tata Kelola SPBE**, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Formulasi Perhitungan Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Hasil <i>assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2023



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2023 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.87 poin	2.40 poin	83,62	Tinggi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis1 "meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi" dengan indikator sasaran "Indeks Domain Tata Kelola SPBE" tahun 2023 dengan target 2.87 poin dan terealisasi 2.40 poin sehingga tercapai sebesar 83,62%. Kondisi ini dapat dikatakan termasuk kategori tinggi namun kinerja belum berjalan sesuai dengan rencana.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.66 poin	2.40 poin	-0,26	97,47	83,62	-12,85

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi" diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja menurun sebesar 0.26 poin dan capaian kinerja menurun 13,85%.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2023 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.40 poin	2,97 poin	80,81

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE. Pada target akhir Renstra, realisasi mengenai Indeks Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2.40 poin, sementara target akhir Renstra adalah 2.97 poin, maka kinerja baru tercapai 80,81%, sehingga belum memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran “*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*” dengan indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh menurunnya pengelolaan program aplikasi informatika. Kondisi lainnya yang mendukung gagalnya capaian kinerja ini yaitu :

- (1) Pada aspek perencanaan strategis SPBE yang meliputi Rencana anggaran SPBE, inovasi proses bisnis SPBE dan pembangunan aplikasi SPBE tingkat kematangannya masih dibawah 3. Rencana anggaran SPBE pemerintah Kabupaten Cirebon masih berada ditingkat kematangan 2 karena rencana dan anggaran SPBE pada perangkat daerah masih belum seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK (Diskominfo). Dokumen inovasi proses bisnis SPBE telah dibuat tetapi belum meliputi semua perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE yang memuat siklus pembangunan aplikasi.



- (2) Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, sudah terpenuhi semua dengan tingkat kematangan 3 baik untuk layanan pusat data maupun jaringan intra Pemerintah Daerah., hanya saja layanan pusat data belum diintegrasikan dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya. Begitu juga jaringan intra belum diintegrasikan dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
- (3) Pada aspek penyelenggara SPBE, sudah terpenuhi dari indikator kolaborasi penerapan SPBE sementara sistem penghubung layanan dan Tim Koordinasi SPBE masih belum optimal. Sistem penghubung layanan dan Tim Koordinasi SPBE masih di tingkat kematangan 2. Sistem penghubung layanan baru diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah. Tim koordinasi SPBE sudah terbentuk secara formal melalui SK Bupati, hanya saja belum semua program kerja sudah dilaksanakan sesuai rencana seperti yang tertulis di Peta Rencana SPBE.

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

- (1) Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus. Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang ditentukan.
- (2) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen inovasi proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE.
- (3) Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan atas layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
- (4) Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan *reviu* fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran "*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi*" diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola SPBE dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.87	2.40	83.62	5.986.451.518	5.924.097.397	98,96	-0.155	Tidak Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir



Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 83,62% dan % capaian keuangan sebesar 98,96% dan tingkat efisiensi -0.155. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan tidak efisien.

G. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-1

Dalam mencapai sasaran strategis ke-1 ini didukung oleh 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 5.986.451.518,00 atau 34,33% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.924.097.397,00 atau 98,96% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp.62.354.121,00.

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 1

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5.986.451.518	5.924.097.397	98,96	100	62.354.121	1,04
1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah	2.874.303.973	2.867.718.544	99,77	100	6.585.429	0,23
1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.874.303.973	2.867.718.544	99,77	100	6.585.429	0,23
2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.112.147.545	3.056.378.853	98,96	100	55.768.692	1,04
2.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.104.500	264.561.685	97,95	100	5.542.815	2,05
2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.760.126.845	1.746.677.988	99,24	100	13.448.857	0,76
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	75.104.900	75.104.900	100	100	0	0,00
2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	607.086.500	605.862.996	99,80	100	1.223.504	0,2
2.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	309.724.800	274.171.284	88,52	100	35.553.516	11,48
2.7	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	90.000.000	90.000.000	100	100	0	0,00
	JUMLAH	5.986.451.518	5.924.097.397	98,96	100	62.354.121	1,04

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini dengan ditunjang infrastruktur yang cukup memadai.

Penguatan Infrastruktur IT



- Pembangunan tower jaringan
- Pengelolaan layanan jaringan internet
- Pembangunan infrastruktur mobile internet

Manajemen Data dan Integrasi Sistem



- Penyediaan layanan server
- Pembangunan rumah genset
- Pengelolaan Command Center
- Pengelolaan CCTV Kabupaten Cirebon
- Pengelolaan Virtual Meeting

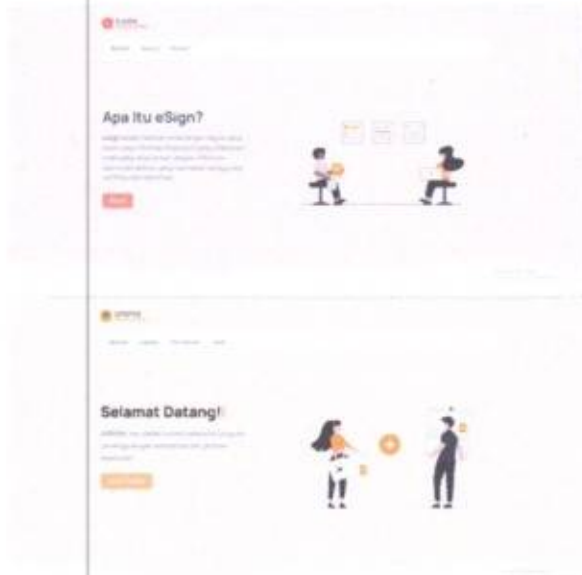


Penyusunan Dokumen SPBE



- Penyusunan dokumen Manajemen Aset SPBE
- Penyusunan dokumen manajemen SDM
- Penyusunan dokumen Smart City

Aplikasi dan Persandian



- Pembangunan aplikasi pemerintah
- Pengembangan aplikasi pemerintah
- Pembangunan aplikasi Satu Data
- Pembangunan aplikasi SSO
- Pembangunan aplikasi Pendataan Kemiskinan



3.2.2 Sasaran Strategis ke-2

Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik

Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik merupakan suatu bentuk upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Adapun rentang nilai peringkat yang menggambarkan sejauhmana keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.9 Rentang Nilai Predikat

No	Predikat	Nilai
1	Informatif	80% - 100%
2	Menuju Informatif	60% - 79,9%
3	Cukup Informatif	40% - 59,9%
4	Kurang informatif	20% - 39,9%
5	Tidak Informatif	0% - 19,9%

Sumber : Laporan Kegiatan Monev dan Permeringkatan Badan Publik, 2022

Tolok ukur capaian sasaran "**meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik**", diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Keterbukaan Informasi Publik**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Formulasi Perhitungan Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$= \frac{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total Komponen}}$ SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak	Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2023

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2023 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50 poin	90,92 poin	181,84	Sangat Tinggi



Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2 “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*” dengan indikator sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” tahun 2023 dengan target 50 poin dan terealisasi 90.92 poin sehingga tercapai sebesar 181,84%. Kondisi ini dapat dikatakan termasuk kategori tinggi dan dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023	%Capaian
Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81.70	90.92	9,2	181,56	181,84	0,28

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 9,2 poin dan capaian kinerja pun meningkat 0,28%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2023 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90.92 poin	57 poin	159,51

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa capaian antara realisasi sasaran ini sebesar 90,92 poin terhadap target akhir renstra sebesar 57 poin yaitu 159,51% sehingga telah melampaui target yang telah ditentukan.



D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran *meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik dengan dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik* tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Namun demikian pada Sasaran ini dapat dibandingkan sebagaimana nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang ada di lingkup Provinsi Jawa Barat. Berikut kami sandingkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang berada di wilayah Kawasan Metropolitan Rebana.

Tabel 3.14 Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Metropolitan Rebana di Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	79,68	20	99,68	Informatif
2	Pemerintah Kabupaten Kuningan	76,72	17,5	94,22	Informatif
3	Pemerintah Kabupaten Cirebon	73,92	17	90,92	Informatif
4	Pemerintah Kabupaten Subang	72,56	18	90,56	Informatif
5	Pemerintah Kota Cirebon	70,8	19,7	90,5	Informatif
6	Pemerintah Kabupaten Majalengka	65,68	14,32	80	Menuju Informatif
7	Pemerintah Kabupaten Indramayu	55,64	14,32	69,96	Cukup Informatif

Sumber : Keputusan KI Provinsi Jabar No. 6 Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas data diketahui bahwa capaian nilai Pemerintah Kabupaten Cirebon Indeks keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023 berada pada urutan ketiga dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kawasan Metropolitan Rebana. Pemerintah Kabupaten Cirebon termasuk 5 (lima) Kabupaten/Kota lainnya dikualifikasikan Pemerintah Kabupaten/Kota *Informatif* dimana merupakan predikat paling tinggi dalam penilaian indeks keterbukaan informasi publik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah meningkatnya program informasi dan komunikasi publik. Kondisi lainnya yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu :

- (1) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media meliputi media massa (surat kabar, Radio, TV), media baru (media online), media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang.



- (2) Media Massa : Dalam pengelolaan media massa, Dinas Komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Surat Kabar Lokal, TV Lokal dan Radio Lokal dalam mendiseminasikan program, kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat.
- (3) Media Baru : Dalam pengelolaan media baru/online Dinas Komunikasi dan informatika melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - a) Website *diskominfo.cirebonkab.go.id*, dimana Dinas Komunikasi dan informatika mengoptimalkan website Dinas dengan berbagai macam konten yang memuat informasi-informasi seputar dokumen kedinasan ataupun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Selain itu konten informasi juga melalui media sosial seperti instagram, facebook dan youtube.
 - b) Pengelolaan media sosial seperti *facebook, instagram, youtube* dan *twitter* dalam rangka mengoptimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat yang lebih luas dan efektif.
 - c) Iklan Layanan Masyarakat, merupakan media informasi terkait program pembangunan pemerintah daerah seperti program stunting, program keluarga berencana dan yang lainnya yang disampaikan melalui media *online*.
 - d) Pengelolaan Saber Hoaks Kabupaten Cirebon merupakan salah satu inovasi dalam meningkatkan peran dan fungsi Diskominfo dalam diseminasi informasi. Dengan adanya Saber Hoaks Kabupaten Cirebon ditujukan untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas fakta-faktanya yang beredar di tengah masyarakat. Dalam pengelolaannya Diskominfo bekerjasama dengan RTIK Kabupaten Cirebon dan Komunitas Halaman Literasi.
- (4) Media tradisional : Penyebarluasan informasi program-program dan kebijakan serta peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah merupakan sarana alternatif yang cukup efektif melalui pertunjukan rakyat tradisional. Dalam kegiatannya, Dinas Komunikasi dan informatika berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) Kabupaten Cirebon.
- (5) Media interpersonal : Media interpersonal meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, forum komunikasi dan lain sebagainya. Dinas Komunikasi dan informatika berupaya meningkatkan peran dan fungsi melalui kegiatan tersebut seperti pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- (6) Media luar ruang merupakan salah satu penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik berupa banner dan melalui wawar mobil keliling.
- (7) Selain 5 (lima) media diatas, secara teknis dalam meningkatkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yaitu :
 - a) Adanya SOP dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik;
 - b) Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik cukup memadai dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan *portal website ppid.cirebonkab.go.id* dalam mempublikasikan data dan informasi.
 - c) Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik karena pelayanan dan ketepatan waktu yang jelas oleh pegawai. Namun, komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi perlu dioptimalkan.
 - d) Sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dapat dikatakan baik karena berupaya mematuhi peraturan, saling mendukung



antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

- (1) **Penyelarasan Strategi Media** : Rancang strategi terpadu yang mencakup semua jenis media untuk memastikan pesan konsisten dan efektif disampaikan melalui berbagai saluran.
- (2) **Analisis Kinerja** : Lakukan analisis kinerja secara teratur untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media.
- (3) **Peningkatan Konten** : Fokus pada pengembangan konten yang relevan, menarik, dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
- (4) **Pemanfaatan Teknologi** : Manfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan media, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan alat manajemen media.
- (5) **Optimasi Platform Online** : Perbarui dan optimalkan platform online, termasuk situs web dan media sosial, untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pengguna.
- (6) **Kemitraan Media** : Bangun kemitraan dengan media lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan dukungan, baik secara online maupun offline.
- (7) **Data dan Informasi** : Agar data dan informasi disampaikan secara transparan, jelas dan wajar.
- (8) **Partisipasi masyarakat** : agar komunikasi Keterbukaan Informasi Publik antar pegawai dengan masyarakat lebih diutamakan dibanding penyampaian informasi melalui media.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran "*meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik*", diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50	90,92	181,84	4.259.555.300	4.249.597.010	99,77	0,823	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 181,84% dan % capaian keuangan sebesar 99,77% dan tingkat efisiensi -0,823. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

G. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-2

Dalam mencapai sasaran strategis ke-2 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.4.259.555.300,00 atau 24,43% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.249.597.010,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp9.958.290,00.

Tabel 3.16 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 2

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.259.555.300	4.249.597.010	99,77	100	9.958.290	0,23
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.259.555.300	4.249.597.010	99,77	100	9.958.290	0,23
1.2	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	113.350.000	113.300.000	99,96	100	50.000	0,04
1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	299.527.800	299.242.984	99,90	100	284.816	0,10
1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	514.144.900	510.793.800	99,35	100	3.351.100	0,65
1.5	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	779.142.300	777.027.496	99,73	100	2.114.804	0,27
1.6	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.783.378.000	1.781.444.688	99,89	100	1.933.312	0,11
1.7	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	99.994.000	99.252.000	99,26	100	742.000	0,74
1.8	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	462.327.700	462.232.196	99,98	100	95.504	0,02
1.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	207.690.600	206.303.846	99,33	100	1.386.754	0,67
JUMLAH		4.259.555.300	4.249.597.010	99,77	100	9.958.290	0,23

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



- Saber Hoaks Kabupaten Cirebon
- Peliputan
- Pengelolaan website Dinas

www.diskominfo.cirebonkab.go.id

Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



- Diseminasi program pemerintah daerah melalui banner
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui TV Lokal
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui Mobil Wawar Keliling
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui media online
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui Radio
- Diseminasi program pemerintah daerah melalui pertunjukan rakyat tradisional

Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik



- Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Bimtk Kehumasan

Fasilitasi sengketa Informasi Publik



- Operasional Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik



3.2.3 Sasaran Strategis ke-3

Sasaran 3

Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor kunci dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Strategi pencapaian sasaran ini pada tahun 2023 ditunjang dengan adanya pemanfaatan aplikasi portal data sebagai wadah untuk menampung dan menampilkan data sektoral yang telah dikumpulkan dari masing-masing produsen data, dan telah meninggalkan sistem pengumpulan data yang manual. Telah dilaksanakannya rapat bersama pengembang aplikasi serta perwakilan dari bidang-bidang untuk memberikan saran terkait pengembangan dan pemeliharaan aplikasi portal data yang sesuai aturan yang berlaku.

Tolok ukur capaian sasaran “meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Formulasi Perhitungan Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$	Hasil <i>assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2023

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 “meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” dengantarget yang ditetapkan tahun 2023 pada indikator sasaran ini adalah 77,50% dengan realisasi 77,52% atau 100,03% sehingga masuk kriteria sangat tinggi.

Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	77,5%	77,52%	100,03	Sangat tinggi



Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:

- 1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 80% dari target akhir Renstra
- 2) Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 75% pada tahun 2023.

Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$$

Pada komponen "*persentase dokumen statistik yang dihasilkan*", Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui Bidang Statistik, Persandian dan E-Government telah menyusun Buku Statistik Daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa target **80%** telah didapat.

Sementara maksud dari komponen "*presentase keterisian data yang dikelola*" adalah keterisian data *opendata.cirebonkab.go.id* yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Sampai dengan Bulan Desember 2023, keterisian data *opendata.cirebonkab.go.id* melebihi ekspektasi yang berawal target hanya 75% justru keterisian Data mencapai 75,05%, yang terdiri dari :

- Total elemen data adalah 1026 data; dan
- Elemen data yang sudah terisi adalah 770 data.

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100 \\
 &= \frac{(80\% + 75,05\%)}{2} \\
 &= \frac{(155,05\%)}{2} \\
 &= 77,52\%
 \end{aligned}$$

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian%
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	76,35%	77,52%	1,17%	117,46%	100,03%	17,43%



Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, **realisasi kinerja meningkat sebesar 1,17%** sementara **capaian kinerja menurun 17,43%**.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2023 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	77,52%	90%	86,13

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral. Pada target akhir Renstra, realisasi mengenai Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral sebesar 77,52% sementara target akhir Renstra adalah 90%, maka kinerja baru tercapai 86,13 %, sehingga belum memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor kunci dalam pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, sehingga tidak dapat membandingkan terhadap standar nasional/RPJMN atau instansi sejenis setara/sekelas lainnya.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Kondisi lainnya yang mendukung capaian kinerja ini antara lain:

- (1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target keterisian data pada *opendatacirebonkab.go.id* sehingga melampaui dari target yang ditetapkan.
- (2) Terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik yang merupakan salah satu komponen dalam pengukuran capaian kinerja.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata telah menyusun daftar data statistik sektoral dan data geospasial yang ada pada seluruh Perangkat Daerah. Daftar data itu menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengirimkan data-data yang sesuai kewenangannya untuk dikirimkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata.
- (4) Data-data yang dikelola pada portal Satu Data Kabupaten Cirebon menjadi pusat data Kabupaten Cirebon dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon Pasal 4 Huruf (b) dan (d) yang berbunyi: "*Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : mengatur tata kelola data di Pemerintah Daerah agar terwujud satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakai (Interoperabilitas)*"; dan "*mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis data dan tepat sasaran*".

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- (1) Bekerjasama dengan BPS untuk melaksanakan penyusunan metadata ke perangkat daerah.
- (2) Melaksanakan TOT Pengelolaan Data.
- (3) Peningkatan infrastruktur statistik dalam mengembangkan portal geospasial Kabupaten Cirebon dan melakukan sosialisasi portal open data Kabupaten Cirebon kepada seluruh perangkat daerah.
- (4) Melaksanakan pembinaan bagi Petugas Pengelola Data.



F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran "Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah" diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi Sasaran 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	77,50	77,52	100,03	606.160.100	599.848.174	98,96	0,011	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100,03% dan % capaian keuangan sebesar 98,96% dan tingkat efisiensi 0,011. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

G. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-3

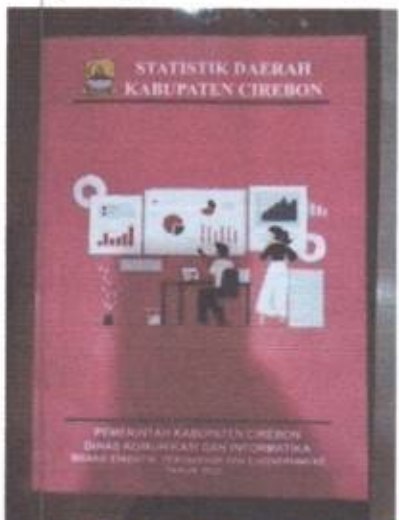
Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp606.160.100,00 atau 2,32% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.599.848.174,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp6.311.926,00.

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 3

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	606.160.100	599.848.174	98,96		6.311.926	1,04
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	606.160.100	599.848.174	98,96		6.311.926	1,04
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000	40.000.000	100	100	0	0
1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	566.160.100	559.848.174	98,89	100	6.311.926	1,04
	JUMLAH	606.160.100	599.848.174	98,96		6.311.926	1,04

Berikut *output* dari sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

Penyelenggaraan Statistik Sektoral



- Buku Statistik Daerah
- Pendampingan penyusunan metadata
- Forum Satu data Kabupaten Cirebon
- Diseminasi data pembangunan Tingkat Kecamatan
- Pelatihan data geospasial
- Pelatihan pengelola aplikasi satu data





3.2.4 Sasaran Strategis ke-4

Sasaran 4

Terwujudnya penyelenggaraan persandian

Terwujudnya penyelenggaraan persandian merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan sistem keamanan informasi yang kuat. Pada saat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses kerja sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Adapun Indeks KAMI adalah Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi/ memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Dengan adanya urusan persandian yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, maka diupayakan dalam penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Tolok ukur capaian sasaran "**Terwujudnya penyelenggaraan persandian**", diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Keamanan Informasi**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Formulasi Pengukuran Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	$= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi / Self Assesment

Sumber: Dokumen IKU tahun 2023

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2023 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.24 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis1 "**Terwujudnya penyelenggaraan persandian**" dengan indikator sasaran "**Indeks Keamanan Informasi** tahun 2023 dengan target

berada pada Level II dan terealisasi Level II sehingga tercapai sebesar 100%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Pada tahun 2023, Pengukuran nilai Indeks Keamanan Informasi dilakukan melalui Penilaian Mandiri atau *Self Assessment*. Berikut hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.



Gambar 3.1. Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan KAMI

Dari gambar diatas, dapat dilihat hasil penilaian Indeks KAMI terdiri dari masing-masing area berikut:

- 1) Tata Kelola Keamanan Informasi, dengan total nilai 39 poin
- 2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, dengan total nilai 19 poin
- 3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi, dengan total nilai 36 poin
- 4) Pengelolaan Aset Informasi, dengan total nilai 115 poin
- 5) Teknologi dan Keamanan Informasi, dengan total nilai 81 poin
- 6) Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga penyedia Layanan, dengan nilai 33%
- 7) Pengamanan Layanan Infrastruktur, dengan nilai 33%
- 8) Perlindungan Data Pribadi, dengan nilai 33%

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian%
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	100	100	100



Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “*Terwujudnya penyelenggaraan persandian*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan informasi menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sama dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja juga tetap sama dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2023 dengan Target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “*terwujudnya penyelenggaraan persandian*” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi. Pada target akhir Renstra, realisasi mengenai Indeks Keamanan Informasi adalah Level II, sementara target akhir Renstra adalah Level II, maka kinerja ini telah tercapai 100%, sehingga telah memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran “*terwujudnya penyelenggaraan persandian*” dengan indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- (1) Adanya dukungan dari konsultan dalam penyelenggaraan persandian.

Meskipun memenuhi target yang diharapkan, namun terdapat hambatan dalam mencapai sasaran strategis ini, diantaranya :

- (1) Urusan persandian masih dianggap sebelah mata dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari sisi anggaran yang hanya 1.28% dari total belanja anggaran dinas tahun 2023.



- 1) Belum adanya regulasi/ dasar hukum yang mengatur tentang keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 2) Penggunaan jaringan sandi (email dinas cirebonkab) belum optimal digunakan di lingkungan Kabupaten Cirebon dalam komunikasi antar perangkat daerah.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi.
- 4) Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran
- 2) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.
- 3) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Kabupaten Cirebon serta turunannya seperti SK, SOP dan lain-lain.
- 4) Melaksanakan sosialisasi optimalisasi penggunaan email dinas mail.cirebonkab.go.id oleh ASN dan perangkat daerah.
- 5) Dilakukan persiapan dalam pelaksanaan ISO 27001:2013 yang direncanakan dilaksanakan tahun 2024.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran "**Terwujudnya penyelenggaraan persandian**" diukur melalui 1 indikator yaitu **Indeks Keamanan Informasi** dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Sasaran 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi	Level II	Level II	100	222.754.500	222.510.492	99,89	0,001	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100% dan % capaian keuangan sebesar 99,89% dan tingkat efisiensi 0,001. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

G. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-4

Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp222.754.500,00 atau 1,28% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.222.510.492,00 dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp244.008,00.

Tabel 3.28 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 4

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
I	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	222.754.500	222.510.492	99,89	100	244.008	0,11
1	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	222.754.500	222.510.492	99,89	100	244.008	0,11
1.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	222.754.500	222.510.492	99,89	100	244.008	0,11
	JUMLAH	222.754.500	222.510.492	99,89	100	244.008	0,11

Penyelenggaraan Persandian



- FGD Sertifikat Elektronik
- Pengadaan sarana keamanan informasi





3.2.5 Sasaran Strategis ke-5

Sasaran 5

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Cirebon merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan baik kepada perangkat daerah lain, ataupun masyarakat. Pengukuran pada sasaran ini dilakukan dengan melihat data total jumlah responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Adapun layanan yang diberikan mulai dari :

1. Persyaratan Pelayanan yang Diberikan Sudah Sesuai
2. Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah
3. Waktu Pelayanan yang Diberikan Tepat Sesuai SOP
4. Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta
5. Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai
6. Pelayanan yang Telah Diberikan Memuaskan
7. Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah
8. Produk Layanan yang Dijanjikan Diberikan Tepat Waktu
9. Tindak Lanjut Pengaduan/Layanan Memuaskan

Tolok ukur capaian sasaran "meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon", diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat**, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29 Formulasi Perhitungan Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

Sumber : Dokumen IKU Diskominfo Tahun 2023

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika tahun 2023 pada sasaran ini menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 3.30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,610 poin	3,612 poin	100,06	Sangat tinggi



Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 5 "meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon" dengan indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun 2023 dengan target 3,610 poin dan terealisasi 3,612 poin sehingga tercapai sebesar 100,06%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dimulai dari tanggal 15 Mei s.d. 13 Juli 2023. Adapun pelayanan yang dinilai adalah pelayanan jaringan internet di 40 Kecamatan lingkup Kabupaten Cirebon. Jumlah responden adalah 265 aparatur. Hasil survey diperoleh data sebagai berikut :

Tabel. 3.31 Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan pelayanan	3,709
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,698
U3	Waktu penyelesaian	3,691
U4	Biaya/tariff	3,811
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,611
U6	Kompetensi pelaksana	3,619
U7	Perilaku pelaksana	3,528
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,317
U9	Sarana dan prasarana	3,853

Dari tabel hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa:

- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam pelayanan dengan nilai rata-rata 3,317 poin (menyatakan cukup responsif);
- Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu 3,853 poin
- Unsur pelayanan lainnya mempunyai nilai unsur pelayanan diatas nilai unsur pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan menyatakan hasil yang cukup baik, yaitu menyatakan hasilnya baik, meliputi kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kewajaran tarif/baya, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam pelayanan sudah baik.

a. Nilai Indeks Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut dikaitkan dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

- $(3.709 \times 0,11) + (3,698 \times 0,11) + (3,691 \times 0,11) + (3,811 \times 0,11) + (3,611 \times 0,11) + (3,619 \times 0,11) + (3,528 \times 0,11) + (3,317 \times 0,11) + (3,853 \times 0,11) = 3,612$.
- Dengan demikian nilai indeks pelayanan diperoleh 3,612 poin

b. Nilai Survei Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,612 \times 25 = 90,30$
- Mutu Pelayanan termasuk kategori **A**.
- Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Baik**.



Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32 Nilai Survei Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			%Capaian		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,594 poin	3,612 poin	0,01	100,14	100,06	-0,08

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja meningkat sebesar 0,01 poinsementaracapaian kinerja menurun 0,08%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Periode Tahun 2019-2024

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2023 dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Tahun Renstra	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.612 poin	3.63 poin	90,50

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran "meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon" diukur melalui 1



indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada target akhir Renstra mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,63 poin. Sementara realisasi indikator ini hingga tahun 2023 yang merupakan tahun keempat Renstra sebesar 3,612 poin maka kinerjabaru mencapai 90,50%, sehingga belum memenuhi target akhir Renstra.

H. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023 dengan Standar Nasional RPJMN Serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran *meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon* tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam objek pelayanan;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan untuk bekerja tanggap dan akurat dengan mengedepankan pelayanan prima.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

- 1) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan penggunaan atribut pendukung petugas pelayanan;
- 2) Diperlukan upaya kemudahan pelanggan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik;
- 3) Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberi motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.35 Tingkat Efisiensi Sasaran 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kinerja			Keuangan			TE	KATEGORI
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.610 poin	3.612 poin	100,06	6.360.782.570	5.577.685.327	87,69	0,141	Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100,06% dan % capaian keuangan sebesar 87,69% dan tingkat efisiensi 0,141. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini dikategorikan efisien.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5

Dalam mencapai sasaran strategis ke-6 ini didukung oleh 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 6.360.782.570,00 atau 36,48% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.738.495.927,00 atau 90,22% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 622.286.643,00.

Tabel 3.36 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.526.000	37.526.000	100	100	0	0
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.147.400	48.147.400	100	100	0	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.711.715.000	4.158.467.451	88,26	100	553.247.549	11,74



No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000.000	13.000.000	100	100	0	0
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74.895.800	74.891.792	99,99	100	4.008	0,01
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
3.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	41.025.600	41.025.600	100	100	0	0
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.001.000	6.001.000	100	100	0	0
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.988.100	200.732.420	96,05	100	8.255.680	3,95
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.184.500	5.184.500	100	100	0	0
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.266.300	14.266.300	100	100	0	0
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.958.000	25.122.500	93,19	100	1.835.500	6,81
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	43.120.600	43.120.600	100	100	0	0
4.7	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	100	100	0	0
4.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.888.900	108.870.012	99,98	100	18.888	0,02
5	Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemda						
5.1	Pengadaan Mebel	31.820.370	31.820.370	100	100	0	0
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.998.500	351.783.286	94,82	100	19.215.214	5,18
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000	345.420.000	95,95	100	14.580.000	4,05



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Efisiensi/ Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.527.000	100.057.900	84,42	100	18.469.100	15,58
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.930.500	6.071.800	87,61	49,60	858.700	12,39
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.330.000	21.330.000	100	100	0	0
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	108.459.000	102.656.996	94,65	100	5.802.004	5,35
	JUMLAH	6.360.782.570	5.738.495.927	90,22	100	622.286.643	9,78

Berikut merupakan dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terkait layanan jaringan internet, sebagai berikut :



Urusan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nilai Rata-rata
Urusan Urus	983	980	979	1010	957	959	935	879	1021		
IPDR / Urus	3.709	3.698	3.691	3.811	3.611	3.619	3.528	3.317	3.653		
IPDR Tertinggi	0,408	0,407	0,406	0,419	0,397	0,398	0,388	0,365	0,424		0,3812
IKM Unit pelayanan											90,30

Keterangan :
 - U1 s.d. U14 = Urus-Urus pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah IPDR Tertinggi x 25
 - **) = Jumlah nilai per urus dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
 - NRR tertimbang = NRR per urus x 0,071

No.	UNSUR PELAYANAN	Nilai Rata-rata
U1	Persiapan pelayanan	3,709
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,698
U3	Waktu Penyelesaian	3,691
U4	Sikap Staf	3,811
U5	Produk Spesifikasi Jasa Pelayanan	3,611
U6	Kompetensi Personalia	3,619
U7	Penyakit, Peningkatan	3,528
U8	Perencanaan Pengadaan, Saran dan Masukan	3,317
U9	Sarana dan Prasarana	3,653

IKM UNIT PELAYANAN :	90,30
Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Baik)	81,26 - 100,00
B (Baik)	62,51 - 81,25
C (Kurang Baik)	43,76 - 62,50
D (Tidak Baik)	25,00 - 43,75



Lampiran 10

**REKAPITULASI HASIL KEGIATAN SKM
REKAPITULASI HASIL KEGIATAN SKM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

JLAI 2023		REKAPITULASI HASIL KEGIATAN SKM	
90,30 poin			
01	LOKASI MELAKUKAN SKM	01	LOKASI MELAKUKAN SKM
02	PERENCANAAN	02	PERENCANAAN
03	PEKERJAAN	03	PEKERJAAN
04	PEMERIKSAAN	04	PEMERIKSAAN
05	MANAJEMEN	05	MANAJEMEN
06	PEKERJAAN	06	PEKERJAAN
07	PEMERIKSAAN	07	PEMERIKSAAN
08	MANAJEMEN	08	MANAJEMEN
09	PEKERJAAN	09	PEKERJAAN
10	PEMERIKSAAN	10	PEMERIKSAAN
11	MANAJEMEN	11	MANAJEMEN
12	PEKERJAAN	12	PEKERJAAN
13	PEMERIKSAAN	13	PEMERIKSAAN
14	MANAJEMEN	14	MANAJEMEN
15	PEKERJAAN	15	PEKERJAAN
16	PEMERIKSAAN	16	PEMERIKSAAN
17	MANAJEMEN	17	MANAJEMEN
18	PEKERJAAN	18	PEKERJAAN
19	PEMERIKSAAN	19	PEMERIKSAAN
20	MANAJEMEN	20	MANAJEMEN
21	PEKERJAAN	21	PEKERJAAN
22	PEMERIKSAAN	22	PEMERIKSAAN
23	MANAJEMEN	23	MANAJEMEN
24	PEKERJAAN	24	PEKERJAAN
25	PEMERIKSAAN	25	PEMERIKSAAN
26	MANAJEMEN	26	MANAJEMEN
27	PEKERJAAN	27	PEKERJAAN
28	PEMERIKSAAN	28	PEMERIKSAAN
29	MANAJEMEN	29	MANAJEMEN
30	PEKERJAAN	30	PEKERJAAN
31	PEMERIKSAAN	31	PEMERIKSAAN
32	MANAJEMEN	32	MANAJEMEN
33	PEKERJAAN	33	PEKERJAAN
34	PEMERIKSAAN	34	PEMERIKSAAN
35	MANAJEMEN	35	MANAJEMEN
36	PEKERJAAN	36	PEKERJAAN
37	PEMERIKSAAN	37	PEMERIKSAAN
38	MANAJEMEN	38	MANAJEMEN
39	PEKERJAAN	39	PEKERJAAN
40	PEMERIKSAAN	40	PEMERIKSAAN
41	MANAJEMEN	41	MANAJEMEN
42	PEKERJAAN	42	PEKERJAAN
43	PEMERIKSAAN	43	PEMERIKSAAN
44	MANAJEMEN	44	MANAJEMEN
45	PEKERJAAN	45	PEKERJAAN
46	PEMERIKSAAN	46	PEMERIKSAAN
47	MANAJEMEN	47	MANAJEMEN
48	PEKERJAAN	48	PEKERJAAN
49	PEMERIKSAAN	49	PEMERIKSAAN
50	MANAJEMEN	50	MANAJEMEN
51	PEKERJAAN	51	PEKERJAAN
52	PEMERIKSAAN	52	PEMERIKSAAN
53	MANAJEMEN	53	MANAJEMEN
54	PEKERJAAN	54	PEKERJAAN
55	PEMERIKSAAN	55	PEMERIKSAAN
56	MANAJEMEN	56	MANAJEMEN
57	PEKERJAAN	57	PEKERJAAN
58	PEMERIKSAAN	58	PEMERIKSAAN
59	MANAJEMEN	59	MANAJEMEN
60	PEKERJAAN	60	PEKERJAAN
61	PEMERIKSAAN	61	PEMERIKSAAN
62	MANAJEMEN	62	MANAJEMEN
63	PEKERJAAN	63	PEKERJAAN
64	PEMERIKSAAN	64	PEMERIKSAAN
65	MANAJEMEN	65	MANAJEMEN
66	PEKERJAAN	66	PEKERJAAN
67	PEMERIKSAAN	67	PEMERIKSAAN
68	MANAJEMEN	68	MANAJEMEN
69	PEKERJAAN	69	PEKERJAAN
70	PEMERIKSAAN	70	PEMERIKSAAN
71	MANAJEMEN	71	MANAJEMEN
72	PEKERJAAN	72	PEKERJAAN
73	PEMERIKSAAN	73	PEMERIKSAAN
74	MANAJEMEN	74	MANAJEMEN
75	PEKERJAAN	75	PEKERJAAN
76	PEMERIKSAAN	76	PEMERIKSAAN
77	MANAJEMEN	77	MANAJEMEN
78	PEKERJAAN	78	PEKERJAAN
79	PEMERIKSAAN	79	PEMERIKSAAN
80	MANAJEMEN	80	MANAJEMEN
81	PEKERJAAN	81	PEKERJAAN
82	PEMERIKSAAN	82	PEMERIKSAAN
83	MANAJEMEN	83	MANAJEMEN
84	PEKERJAAN	84	PEKERJAAN
85	PEMERIKSAAN	85	PEMERIKSAAN
86	MANAJEMEN	86	MANAJEMEN
87	PEKERJAAN	87	PEKERJAAN
88	PEMERIKSAAN	88	PEMERIKSAAN
89	MANAJEMEN	89	MANAJEMEN
90	PEKERJAAN	90	PEKERJAAN
91	PEMERIKSAAN	91	PEMERIKSAAN
92	MANAJEMEN	92	MANAJEMEN
93	PEKERJAAN	93	PEKERJAAN
94	PEMERIKSAAN	94	PEMERIKSAAN
95	MANAJEMEN	95	MANAJEMEN
96	PEKERJAAN	96	PEKERJAAN
97	PEMERIKSAAN	97	PEMERIKSAAN
98	MANAJEMEN	98	MANAJEMEN
99	PEKERJAAN	99	PEKERJAAN
100	PEMERIKSAAN	100	PEMERIKSAAN

Total poin SKM adalah 90,30 poin

Rekapitulasi hasil kegiatan SKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Gambar 41. Hasil kegiatan berupa laporan SKM Tahun 2023

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah **Rp 17.435.703.988** dengan **realisasi Rp. 16.734.549.000** atau **95,98%**. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah **Rp. 701.154.988,00..** Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023.

Sementara realisasi PAD dari retribusi menara telekomunikasi tahun 2023 sebesar Rp. 2.541.916.500,00 dengan capaian 103,41% dari target Rp. 2.457.989.624,00. Agar lebih jelas dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 3.37 Pendapatan dan Belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.457.989.624	2.541.916.500	103,41
	JUMLAH PENDAPATAN	2.457.989.624	2.541.916.500	103,41
5.	BELANJA DAERAH	17.435.703.988	16.734.549.000	95,98
5.1.	BELANJA OPERASI	15.310.860.518	14.630.710.210	95,56
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	4.694.356.100	4.141.108.551	88,21
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.616.504.418	10.489.601.659	98,80
5.2.	BELANJA MODAL	2.124.843.470	2.103.838.790	99,01
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.031.343.470	2.010.788.790	98,99
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	93.500.000	93.050.000	99,52
	JUMLAH BELANJA	17.435.703.988	16.734.549.000	95,98

Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.38 Capaian Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	5.986.451.518	5.924.097.397	98,96	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	4.259.555.300	4.249.597.010	99,77	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	606.160.100	599.848.174	98,96	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	222.754.500	222.510.492	99,89	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	6.360.782.570	5.577.685.327	87,69	Didukung oleh 1 (satu) program : • Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota


Sumber : Simonek.go.id

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah untuk mendukung sasaran kesatu yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon", sedangkan sasaran yang paling sedikit alokasi anggarannya adalah pada sasaran keempat "Terwujudnya penyelenggaraan persandian". Sementara capaian/realisasi keuangan paling tinggi yaitu pada sasaran "Terwujudnya penyelenggaraan persandian" dan capaian/realisasi paling rendah yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon"

3.4 Inovasi

Digitalisasi di era global dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya *good governance* menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menginisiasi inovasi tahun 2023, sebagai berikut:

No	Aplikasi	Deskripsi
1	SIPEPEK 	SIPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan

2	<p>eSign</p> 	<p>Esign merupakan bentuk tanda tangan digital yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Portal yang diakses https://esign.cirebonkab.go.id.</p>
---	--	---

3.5 Penghargaan

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menerima beberapa penghargaan dan prestasi sebagai pengakuan atas pencapaian dinas. Berikut adalah beberapa diantaranya :

No	Penghargaan
1	Juara 2 penyelenggaraan tata kelola data terbaik Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Barat
2	Kabupaten Informatif Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat
3	Jabar Saber Hoaks kategori anti hoax of the year Diskominfo Provinsi Jawa Barat
4	Penghargaan Kategori Mitra kolaborasi daerah terbaik RTIK bersama Diskominfo Kabupaten Cirebon dan Saber Hoaks Kabupaten Cirebon





BAB IV PENUTUP

BAB IV berisi :

4.1 Kesimpulan

4.2 Rencana Tindak

Lanjut

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari analisis 5 (lima) sasaran, yaitu
 - a) Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi" dengan indikator sasaran "Indeks Domain Tata Kelola SPBE" sebesar 83,62% atau termasuk kategori tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi -0,155 sehingga dapat dikatakan tidak efisien.
 - b) Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik" dengan indikator sasaran "Indeks Keterbukaan Informasi Publik" sebesar 181,84% atau termasuk kategori sangat tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,823 atau dapat dikatakan efisien.
 - c) Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah" dengan indikator sasaran "Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral" sebesar 100,03% atau termasuk kategori sangat tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,011 atau dapat dikatakan efisien.
 - d) Capaian sasaran strategis 4 "Terwujudnya penyelenggaraan persandian" dengan indikator sasaran "Indeks Keamanan Informasi" sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi, dengan didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,001 atau dapat dikatakan efisien.
 - e) Capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitaskinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon" dengan indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 100,06% atau termasuk kategori sangat tinggi, dengan didukung oleh 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,141 atau dapat dikatakan efisien



- 2) Realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah Rp. 16.734.549.000,00 dengan presentase 95.98% dari keseluruhan anggaran Belanja sebesar Rp. 17.435.703.955,00, dan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 700.154.988,00 atau sebesar 4,02%

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di masa mendatang, diperlukan strategi-strategi terukur, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ada.
- 2) Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan kepegawaian.
- 3) Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus. Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang ditentukan.
- 4) Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen inovasi proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE.
- 5) Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan atas layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
- 6) Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan *reviu* fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.
- 7) Penyelarasan stargegi media, mengidentifikasi tren kelemahan dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media, peningkatan konten, pemanfaatan teknologi, optimasi platform online, peningkatan kemitraan media dan melibatkan partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi publik dapat meningkat.
- 8) Mendorong peningkatansingle data dan big datacentre yang terintegrasikan, sehingga akan mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan, indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait.
- 9) Melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan tata kelola data statistic sektoral
- 10) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman melalui Digitalent Kominfo.



Dengan tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015



LAMPIRAN

- Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 2022
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2022
- Lampiran 5. IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023
- Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
- Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2023
- Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2023
- Lampiran 9. IKU 5 - Hasil Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
- Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi



Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 Sumber</p>	Nomor SOP	050/1148/Sekret
	Tanggal Pembuatan	03 November 2017
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon SUGENG DARSONO, SH., MM NIP. 19620718 198603 1 003
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan/ Sekretariat	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Membisa kevesangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Membisa kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data kinerja SKPD 	

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Perjanjian Kinerja SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Renstra SKPD Format penyusunan LAKIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

No	Keputusan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Sekdis	Kasubag PEP	Aspiraris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP DISKOMINFO	○				Disposisi Surat	20 menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing - masing bidang dan sekretariat		□			Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat			□		Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	2 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat		□			Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
5.	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul			□		Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Draft LAKIP DISKOMINFO	
6.	Membuat dokumen LAKIP DISKOMINFO	Ya	□			Draft LAKIP DISKOMINFO	1 minggu	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP DISKOMINFO	Ya	□			Dokumen LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan	Tidak	□			Dokumen LAKIP DISKOMINFO	3 jam	Dokumen LAKIP	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP DISKOMINFO oleh Kepala Dinas				□	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		□			Konsep surat pengantar	20 menit	Surat Pengantar	
11.	Penggunaan Dokumen LAKIP			□		Dokumen LAKIP DISKOMINFO	30 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
12.	Pengiriman dokumen LAKIP DISKOMINFO ke BAPPSELITBANGDA dan pengarsipan				○	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	15 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M. Ag
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan melaksanakan target kinerja yang terdapatnya terlampir perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber : Oktober 2023

Pihak Kesatu

Drs. H. IMRON, M. Ag

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.
Perdana Tk I
NIP. 19631024 200804 1 015



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Setelah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan TI-Government (2022-2024)	3,1 KGA	3,1 POK
4.1.01	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Aplikasi Informatika (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan TI-Government (2022-2024)	2,87 KGA	2,87 POK
4.1.02	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan perluasan masyarakat memanfaatkan informasi dan komunikasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{(\text{variabel} \times 50) + (\text{VA} \times \text{Variabel})}{\text{Total komponen}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik (2020-2021) Bidang Statistik, Persandian dan TI-Government (2022-2024)	50 POK	50 POK
4.1.03	Meningkatnya pengendalian dan layanan statistik jabatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Perwujudan pengendalian dan layanan statistik sektoral	$\frac{\sum \text{variabel} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Statistik dan Persandian	77,5 PERSEN	77,5 PERSEN
4.1.04	Terkennanya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (IKAI)	$\frac{\sum \text{jawaban} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Statistik dan Persandian	2 LEVEL	2 LEVEL
4.1.06	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\sum \text{variabel} \times \text{Bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	3,61 POK	3,61 POK

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.01.01	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5.676.524.301,00	5.986.451.518,00	Sumber Dana: OTU-GAI, PA, Per-Jan
4.1.02.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.509.581.700,00	4.253.555.300,00	Sumber Dana: OTU-GAI, PA, Per-Jan
4.1.03.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	606.240.100,00	606.240.100,00	Sumber Dana: OTU-GAI
4.1.04.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENSAMANAAN INFORMASI	95.800.000,00	222.754.500,00	Sumber Dana: OTU-GAI, PA, Per-Jan

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.06.01	PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEOTA	5.921.294.120,00	6.390.763.968,00	Sumber Dana: OTU-GAI
	J U M L A H	12.809.390.211,00	17.438.765.968,00	

Drs. H. IMRON, M. Ag

Sumber : Oktober 2023
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.
Perdana Tk I
NIP. 19631024 200804 1 015



Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Soedan Giri No. 2 Telp/Fax : (0231) 321643
website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@indonekab.go.id
SUMBER

CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800/317-Sekt tanggal 03 Februari 2022 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai dari tanggal 27 Februari s.d 10 Maret 2023

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, diperoleh hasil sbd:

Nama Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Nilai Angka Evaluasi AKIP 70,70
Kategori Predikat BB (Sangat Baik)

A. PERENCANAAN KINERJA

- 1. Rencana aksi dan pengukurannya belum dapat dilakukan secara berkala paling tidak triwulan dengan membuat laporan hasil pengukuran ukuran kinerja secara berkala.
2. Target dalam PA tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya namun belum dilengkapi dengan bukti laporan hasil evaluasi.
3. Dokumen perencanaan kinerja (revisi) belum dibuat secara berkala.
4. Rapat rutin telah dilaksanakan dengan membahas terkait pencapaian kinerja termasuk membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya, namun belum dilengkapi dengan dokumen notulen rapat.

B. PENGUKURAN KINERJA

- 5. Adanya keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja belum dapat pengukuran kinerja, namun belum dilengkapi dengan notulen rapat.
6. Unit kerja belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tepat waktu sesuai dengan surat perintah tahun sebelumnya pengukuran kinerja.
7. Pengumpulan data kinerja dari masing-masing penanggungjawab belum dilakukan secara berjangka.
8. Pimpinan unit kerja belum memberikan Reward atau Punishment kepada Pegawai di lingkungannya berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Capaian Kinerja).
9. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penentuan/pengalokasian jabatan baik struktural maupun fungsional.
10. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyusunan (Refooding) Organisasi.
11. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja, namun belum dilengkapi dengan dokumen hasil keputusan rapat.

Table with 2 columns: No and Description. Contains items 12-18 regarding internal performance evaluation and reporting.

Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, agar:

Table with 2 columns: A and B. Contains detailed recommendations for planning and performance measurement.

Demikian Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon
BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19781024 200604 1 015

Sumber, Maret 2023

Wakil Penanggung Jawab
Dra. Hj. ENI SENIWATI, M.Si.
NIP. 19680729 199303 2 004

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON
Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002



Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2022

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET
A. PERENCANAAN KINERJA			
1.	Rencana aksi dan pengukurannya belum dipantau dilakukan secara berkala paling setiap triwulan dengan membuat laporan hasil pengukuran capaian kinerja secara berkala.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK - Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022 - Dokumen triwulanan kinerja dan keuangan tahun 2022
2.	Target dalam PK tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya namun belum dilengkapi dengan bukti laporan hasil evaluasi.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022
3.	Dokumen perencanaan kinerja (renstra) belum direviu secara berkala.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022
4.	Rapat rutin telah dilaksanakan dengan membahas terkait pencapaian kinerja termasuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya, namun belum dilengkapi dengan dokumen notulen rapat.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022
B. PENGUKURAN KINERJA			
5.	Adanya keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja dalam rapat pengukuran kinerja, namun belum dilengkapi dengan notulen rapat.	- Rapat evaluasi kinerja dan keuangan tahun anggaran 2022	- Notulen rapat evaluasi kinerja dan keuangan per triwulan tahun 2022
6.	Unit kerja belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tepat waktu sesuai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan pengukuran kinerja.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK - Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022 - Dokumen triwulanan kinerja dan keuangan tahun 2022
7.	Pengumpul data kinerja dari masing-masing penanggungjawab belum dilakukan secara berjenjang.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022 - SOP Pengumpulan data kinerja
8.	Pimpinan unit kerja belum memberikan Reward atau Punishment kepada Pegawai dilingkungannya berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Capaian Kineja).	- Pemberian reward and punishment kepada pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022	- Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Dinas Kominfo Tahun 2022
9.	Pengukuran kineja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	- Melakukan reviu kinerja pegawai	- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022
10.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	- Melakukan reviu kinerja pegawai	- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022
11.	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, namun belum dilengkapi dengan dokumen hasil keputusan rapat.	- Rapat evaluasi kinerja dan keuangan tahun anggaran 2022	- Notulen rapat evaluasi kinerja dan keuangan per triwulan tahun 2022
12.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja, namun belum didukung dengan dokumen hasil keputusan rapat.	- Rapat evaluasi kinerja dan keuangan tahun anggaran 2022	- Notulen rapat evaluasi kinerja dan keuangan per triwulan tahun 2022
C. PELAPORAN KINERJA			
13.	Laporan kinerja belum dilakukan reviu internal.	- Melakukan monitoring dan Reviu secara berkala terhadap pencapaian target kinerja melalui aplikasi SIMONEK - Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022 - Dokumen triwulanan kinerja dan keuangan tahun 2022
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
14.	Evaluasi AKIP internal yang dilaksanakan belum seluruhnya mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 88/2021.	- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022	- Dokumen triwulanan kinerja dan keuangan tahun 2022
15.	Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh SDM yang belum mengikuti pelatihan/ diklat SAKIP.	- Surat Tugas dan laporan hasil Bimtek penyusunan LKIP	- Dokumen LKIP tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku
16.	Belum dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal yang dilaksanakan oleh unit kerja.	- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022	- Dokumen triwulanan kinerja dan keuangan tahun 2022
17.	Belum dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal pada unit kerja/ perangkat daerah.	- Laporan Triwulanan Kinerja dan Keuangan tahun 2022	- Dokumen triwulanan kinerja dan keuangan tahun 2022
18.	Dalam melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi/aplikasi	- Aplikasi Simonek dan ekinerja	- Laporan Simonek Tiap Bulan tahun 2022

Sumber, Juli 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

BAMBANG SUDARYANTO, SH., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200604 1 015



Lampiran 5. IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023



KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUARAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUANAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

Table with 4 columns: No, Nama Instansi, Indeks, Predikat. Lists government agencies in West Java with their SPBE scores and ratings.

-10-

Table with 4 columns: No, Nama Instansi, Indeks, Predikat. Continues the list of government agencies and their SPBE scores and ratings.

Hasil Evaluasi SPBE 2023

Summary table showing evaluation details for Cirebon, including scores for various domains like Policy, Strategy, Management, and Service.

Rekap Tingkat Kematangan

Large table with 3 columns: No, Indikator, Level. Lists 47 indicators and their maturity levels.



Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 6 Tahun 2023

Tentang

HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT.

Menimbang:

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- Bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2023.

Mengingat:

- Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6
TAHUN : 2023
TENTANG : HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023

A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	79,68	20	99,68	INFORMATIF
2	Pemerintah Kota Bandung	77,92	20	97,92	INFORMATIF
3	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	78,16	19,66	97,82	INFORMATIF
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	79,52	17,5	97,02	INFORMATIF
5	Pemerintah Kabupaten Karawang	77,76	17,5	95,26	INFORMATIF
6	Pemerintah Kabupaten Kuningan	76,72	17,5	94,22	INFORMATIF
7	Pemerintah Kota Bekasi	74,32	19,82	94,14	INFORMATIF
8	Pemerintah Kota Depok	75,36	17,82	93,18	INFORMATIF
9	Pemerintah Kabupaten Bogor	75,28	17,5	92,78	INFORMATIF
10	Pemerintah Kota Banjar	73,4	17,66	91,06	INFORMATIF
11	Pemerintah Kota Sukabumi	70,96	20	90,96	INFORMATIF
12	Pemerintah Kabupaten Cirebon	73,92	17	90,92	INFORMATIF

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Hasil Tim Penilai Independen tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023.
 - KEDUA** : Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 dibagi dalam Beberapa Kategori Badan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - KETIGA** : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.
 - KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 November 2023

Komis Informasi Provinsi Jawa Barat
Ketua.

Dr. H. Ijang Faisal, M.Si

Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2023

- Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:
 - Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 80% dari target akhir Renstra
 - Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 75% pada tahun 2023.

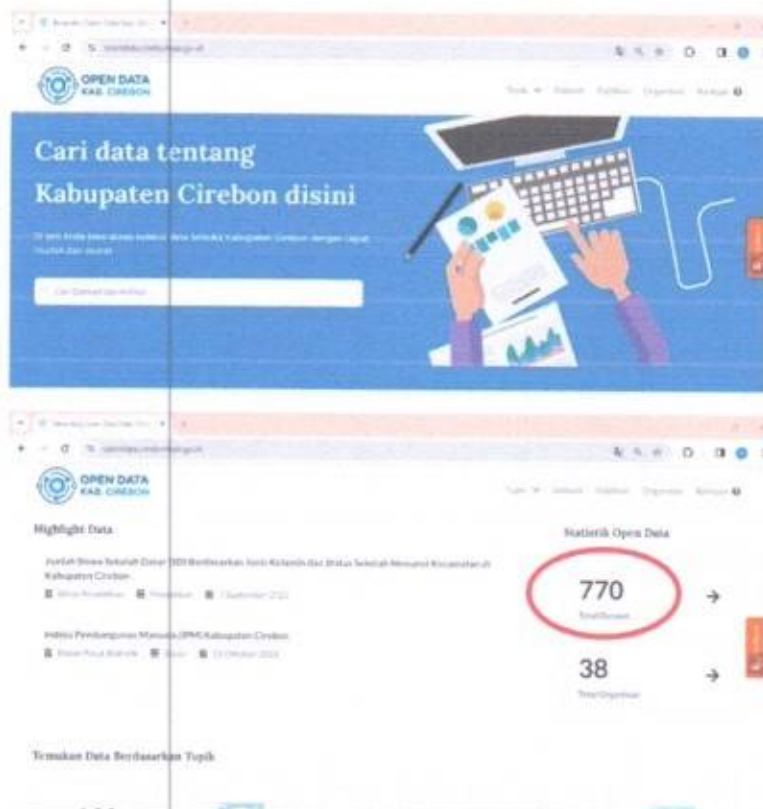
Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$$

- Capaian dari komponen sasaran ini sebagai berikut :
 - Capaian presentase dokumen statistik yang dihasilkan adalah 80%, dengan telah disusunnya buku statistik daerah
 - Capaian presentase keterisian data yang dikelola adalah 75,05%, dengan telah terisinya data 770 data dari total 1026 data.

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data pada opendata})}{\text{Total Komponen}} \times 100 \\ &= \frac{(80\% + 75,05\%)}{2} \\ &= \frac{(155,05\%)}{2} \\ &= 77.52\% \end{aligned}$$





Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2023





Lampiran 9. IKU 5 - Hasil Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

LAPORAN
Survei Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

A Sunda Drajat No. 15 - Sumber
Telp: (031) 818556
Email: diskominfo@cirebonkab.go.id
Website: diskominfo.cirebonkab.go.id

Lampiran II

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PELAYANAN JARINGAN INTERNET
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

NILAI IKM		
90,30 poin		

PELAYANAN JARINGAN INTERNET	
RESPONDEN	
JUMLAH	265 ORANG
JENIS KELAMBI	L = 160 ORANG P = 105 ORANG
PENYEBABAN	S0 = 0 ORANG S1P = 0 ORANG S1TA = 103 ORANG D0 = 24 ORANG S1 = 113 ORANG S2 = 28 ORANG
Periode Survei 18 Mei s.d 13 Juli 2023	

Tingkat tinggi atas pelayanan yang telah anda terima. Mudah anda sangat bersedia untuk mengajukan kritik/kesugi agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sama.

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.709
U2	Prosedur	3.698
U3	Waktu Penyelesaian	3.691
U4	Biaya/Tarif	3.811
U5	Produk Spesifikasi	3.611
U6	Kompetensi Pelaksana	3.619
U7	Perilaku Pelaksana	3.528
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.317
U9	Sarana dan Prasarana	3.853

NO	KELOMPOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NILAI Pengukuran
1	ΣNilai /Unsur	983	980	978	1010	957	959	935	879	1021		
2	NRR / Unsur	3.709	3.698	3.691	3.811	3.611	3.619	3.528	3.317	3.853		
3	NRR tertbg/ unsur	0,408	0,407	0,406	0,419	0,397	0,398	0,388	0,365	0,424	*)	
IKM Unit pelayanan											**	90,30

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.709
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.698
U3	Waktu Penyelesaian	3.691
U4	Biaya/Tarif	3.811
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.611
U6	Kompetensi Pelaksana	3.619
U7	Perilaku Pelaksana	3.528
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.317
U9	Sarana dan Prasarana	3.853

IKM UNIT PELAYANAN :	90,30
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B (Baik) : 62,51 - 81,25
- C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75



Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut.

$$\text{IE} = \frac{\% \text{CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{SE} = \frac{\% \text{RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: Kegiatan Efisien
Apabila $IE < SE$: Kegiatan Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$